

# Prosiding seminar Nasional dan Pertemuan APSIPI

*by* Hevi Kurnia Hardini

---

**Submission date:** 21-Oct-2018 11:36PM (UTC-0700)

**Submission ID:** 1024377037

**File name:** an\_Pajak\_Hiburan\_Pasca\_Implementasi\_Permenkeu\_158\_Tahun\_2015.pdf (960.13K)

**Word count:** 6084

**Character count:** 38302

**OPTIMALISASI DESENTRALISASI EKONOMI  
PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN PASCA  
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 158 TAHUN 2015  
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu)**

**Hevi Kurnia Hardini, S.I.P, MA.Gov<sup>1</sup>  
Universitas Muhammadiyah Malang  
hevi.hardini@gmail.com**

**ABSTRAK**

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan, kini kedua sektor tersebut tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perubahan ini disatu sisi merupakan upaya dari pemerintah pusat untuk melakukan penertiban pengenaan "double taxation" dari salah satu objek pajak, dikarenakan objek tersebut sudah dipungut oleh pemerintah daerah. Pada konteks Pemerintah Kota Batu, sektor pajak hiburan diatur pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan. Hal ini dikarenakan, tidak lagi terdapat prosentase bagi hasil dari dana perimbangan sektor PPN jasa hiburan dan kesenian dari pemerintah pusat kepada daerah, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan optimalisasi atas perolehan pajak dari sektor hiburan secara mandiri dalam konteks desentralisasi ekonomi.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat 2 (dua) langkah optimalisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Batu khususnya Dinas Pendapatan antara lain, 1). Melakukan monitoring dan evaluasi 2). Menyelenggarakan pelayanan prima. Sedangkan upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu dalam prakteknya, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dialami antara lain, Alokasi anggaran yang terbatas, kurangnya pemahaman wajib pajak, Sumber daya manusia yang kurang memadai pada bidang Seksi Pengawasan Dinas Pendapatan.

Adapun strategi untuk mengotimalkan penerimaan pajak hiburan Kota Batu yaitu, 1). Menambah jumlah dan kualitas SDM pada seksi pengawasan Dinas Pendapatan Kota Batu yang melakukan proses pengawasan langsung dilapangan, 2). Meningkatkan teknologi informasi terkait dengan administrasi penerimaan laporan wajib pajak sektor hiburan untuk mengurangi terjadinya human error, 3). Pemerintah daerah membuat peraturan secara khusus terkait upaya optimalisasi penerimaan pajak hiburan, 4). Mengalokasikan anggaran guna memaksimalkan kinerja, terutama pada bidang pengawasan yang memiliki jumlah staf terbatas.

**Kata Kunci:** *Desentralisasi Ekonomi, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Hiburan dan Optimalisasi Pengelolaan*

<sup>1</sup> Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas 246, Telp: (0341) 464 318 Fax: (0341) 460 435. E-mail: [hevihardini@gmail.com](mailto:hevihardini@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan elemen penting pada pendapatan negara guna membiayai program pembangunan (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Oleh karena itu, sektor-sektor strategis yang dapat mengoptimalkan sumber pendapatan dari pajak akan terus dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi oleh pemerintah. Sebagian besar sektor pajak akan dikenakan pada komoditas strategis, ekonomis serta hal-hal terkait dengan sektor yang keberadaannya dibatasi oleh pemerintah seperti rokok, minuman beralkohol, diskotik dan kelab malam.

Adapun untuk jenis pajak yang dikelola pemerintah provinsi berbeda dengan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Terdapat perubahan regulasi pada konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa hiburan dan kesenian. Sejak ditetapkannya PMK No.158/PMK.010/2015 tentang pembebasan PPN terhadap Jasa Hiburan, perubahan ini disatu sisi merupakan upaya dari pemerintah pusat untuk melakukan penertiban pengenaan "double taxation terhadap satu objek pajak", hal ini dikarenakan pajak jasa hiburan telah dipungut oleh pemerintah daerah. Alasan rasionalnya adalah Pemerintah ingin memberikan ruang desentralisasi ekonomi pada daerah untuk melakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah pada sektor hiburan, sekaligus ruang pengembangan sektor industri hiburan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pada satu sisi, pemberlakuan peraturan tersebut memiliki sisi positif yaitu peringanan tarif pada objek jasa hiburan (PMK 158/PMK.010/2015 pasal 2 ayat 2), sedangkan pada sisi yang lain, pemberlakuan regulasi tersebut disinyalir memberi efek negatif, terutama dalam bentuk peningkatan penggunaan jasa hiburan pada sektor diskotik, karaoke, kelab malam yang berujung pada kekhawatiran dekadensi moral masyarakat. Kelompok ini percaya bahwa pengenaan PPN merupakan bentuk *double taxation* yang mampu memberi efek pembatasan pada sektor hiburan malam disamping pengenaan pajak jasa hiburan oleh pemerintah daerah secara bersamaan.

Penelitian ini berikutnya akan berfokus pada pengelolaan pajak hiburan setelah penetapan PMK No. 158/PMK.010/2015. Pada konteks Pemerintah Kota Batu, penetapan pajak hiburan diatur pada Perda Kota Batu No. 2/2012 Tentang Perubahan Pada Kota Batu No. 6/2010 Tentang Pajak Hiburan. Dengan potensi sebagai kota agrowisata yang menyajikan destinasi wisata alam dan wana wisata modern, pemerintah kota batu menetapkan standar regulasi untuk hiburan dengan beberapa varian prosentase sebagai berikut:

**Tabel 1. Perbandingan Prosentase Sektor Pajak Hiburan Menurut Perda No Tahun 2010 dan Perda No 6 Tahun 2012 di Kota Batu**

Jenis Pajak Hiburan	2010	2012
Film dan sejenisnya	35%	10%
Kesenian musik, tari dan/atau busana	35%	10%
Kesenian yang bersifat tradisional yang dilindungi, dilestarikan, bersifat kreatif	10%	5%
Kontes kecantikan, bina raga	35%	10%
Pameran komputer, elektronik, otomotif, property, busana, taman wisata buatan dan sejenisnya		10%
Pendidikan seperti taman wisata yang memperkenalkan, menggelar atau mempertunjukkan pengetahuan tentang satwa, tumbuhan dan budaya, serta museum atau galeri	35%	7,5%
Karaoke, klub malam dan sejenisnya	Karaoke (35%), Klub Malam (75%)	25 %
Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya	35%	10%
Permainan bilyar	35%	20%
Permainan golf dan bowling	35%	pajak 25%
Permainan olah raga lainnya seperti permainan sepak bola mini dan sejenisnya	15 %	10%
Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan	Pacuan kuda & kendaraan bermotor 35% Permainan ketangkasan 75%	10%
Panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa	75%	25%
Pusat kebugaran (fitness centre) dan sejenisnya		10%
Pertandingan olah raga	15%	10%

**Sumber: Perda No 6 tahun 2010 dan Perda No 2 Tahun 2012 Kota Batu**

Berdasarkan gambaran dari tabel 1 terkait dengan perbedaan varian prosentase penarikan pajak di kota batu khususnya Peraturan Daerah No 6 Tahun 2010, menunjukkan pada spirit kebijakan yang memberikan ruang berupa dukungan penguatan pendidikan dan hiburan kesenian rakyat dan tradisional pada level prosentase paling ringan yaitu 10 %, kemudian sektor pertandingan olahraga masih meningkat pada level 15 %, hal ini juga merupakan bentuk dukungan pemerintah pada penguatan sektor olahraga di daerah dan tidak dikategorikan pada ranah komersialisasi. Berikutnya prosentase pajak meningkat pada level 35% pada sektor wisata rekreatif yang turut memberikan sumbangsih strategis bagi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu seperti wahana wisata alam dan modern. Hal yang menarik adalah, sektor hiburan malam dikenakan pajak pada prosentase maksimal sebesar 75%. Jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan pajak hiburan malam sebesar 25% (Perda Provinsi DKI Jakarta No 3 Tahun 2015 ) dan Pemerintah Kabupaten Badung Bali yang menetapkan prosentase pajak hiburan malam hanya sebesar 12,5% (Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, 2015), maka bisa disimpulkan meski kota batu adalah *icon* wisata di Jawa Timur, akan tetapi sektor hiburan malam masih dikategorikan sebagai

sektor yang perlu untuk dibatasi. Hal demikian merefleksikan nilai dan norma yang diusung oleh DPRD dan Pemerintah Kota Batu selama proses penetapan Peraturan Daerah terkait Pajak Hiburan.

Tabel 1 menunjukkan perubahan kebijakan Pemerintah Kota Batu terkait dengan pungutan pajak hiburan. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 menunjukkan Prosentase yang berbeda. Pajak Hiburan yang memiliki nilai pungutan paling kecil adalah pajak hiburan yang menyangkut kesenian tradisional yang dilindungi, dilestarikan dan bersifat kreatif yaitu sebesar 5%. Kemudian pajak senilai 7,5% dikenakan kepada hiburan yang mendukung pendidikan seperti taman wisata yang mempertunjukkan pengetahuan tentang satwa, tumbuhan dan budaya serta termasuk didalamnya museum atau galeri. Sedangkan secara berturut pajak hiburan yang mengalami penurunan nilai pungutan yaitu film, Kesenian music/tari, kontes kecantikan dan bina raga, sirkus, acrobat, sulap, permainan sepak bola, pacuan kuda, kendaraan bermotor, ketangkasan, dan pusat kebugaran yaitu sebesar 10% (dari semula sekitar 15%-35%). Berikut adalah prosentase perbandingan perolehan pajak hiburan dengan beberapa sektor lain pajak daerah sebagai berikut:

**Tabel 2. Perbandingan Potensi Pajak (dalam Juta) dan % Tiap Jenis Pajak di Kota Batu**

NO	JENIS PAJAK	TAHUN 2013	%	TAHUN 2014	%
1	Pajak Hotel	87	0.06	89	0.06
2	Pajak Restoran	91	0.06	155	0.11
3	Pajak Hiburan	34	0.02	38	0.03
4	Pajak Reklame	1,389	0.98	1,416	0.99
5	Pajak Parkir	16	0.01	18	0.01
6	Pajak Penerangan Jalan	43,308	30.4	43,308	30.37
7	Pajak ABT	153	0.11	153	0.11
8	Pajak BPHTB	1,232	0.87	1,294	0.91
9	PBB-P2	95,801	67.4	96,126	67.41
<b>TOTAL</b>		<b>142,111</b>	<b>100</b>	<b>142,597</b>	<b>100</b>

Sumber : Data data diolah, 2015

Sebagaimana dipaparkan pada Tabel 2, menunjukkan bahwa sektor pajak hiburan merupakan kategori rekreatif yang tidak menyumbangkan prosentase pemasukan pada PAD secara mayoritas seperti halnya dari sektor PBB. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dilakukan penelitian ilmiah terkait penghapusan mekanisme *double taxation* sektor hiburan dan kesenian (pengenaan PPn jasa hiburan bersama dengan penarikan pajak daerah sektor hiburan). Dengan ketetapan ini telah dipastikan tidak ada lagi prosentase bagi hasil dana perimbangan yang berasal dari PPn jasa hiburan dari pemerintah pusat kepada daerah, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan optimalisasi

atas perolehan pajak dari sektor hiburan secara mandiri dalam konteks desentralisasi ekonomi, padahal disisi lain sektor pajak hiburan di Kota Batu dikenakan prosentasi pajak maksimal yaitu 75%, yang berarti perkembangan sektor usaha hiburan malam memiliki kendala besar atas pajak yang dibebankan.

## 2. Rumusan Masalah

1

1. Bagaimana optimalisasi pengelolaan Pajak Hiburan oleh Pemda Kota Batu Pasca Implementasi PMK No. 158/2015?
2. Bagaimana Pemda Kota Batu mengelola hambatan optimalisasi Pajak Hiburan Pasca Implementasi PMK No .158/015?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah

Optimalisasi didefinisikan sebagai sebuah proses pencapaian dengan cara terbaik dalam memperoleh keuntungan tanpa mengurangi kualitas (NS Sofyan 2014). Adapun Winardi (1996:363) dalam ZM Muharani 2015 menyebutkan bahwa optimalisasi adalah ukuran pencapaian tujuan terbaik dari yang tersedia (Winardi, 1996:363 dalam ZM Muharani 2015). Konsep optimalisasi tersebut jika dikaitkan dengan konteks pengelolaan pajak daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menggali semaksimal mungkin potensi perolehan pajak daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggalan potensi pajak daerah tersebut dapat dilakukan dengan strategi intensifikasi dalam artian memaksimalkan potensi yang telah ada agar terserap lebih baik, sedangkan ekstensifikasi melakukan perluasan potensi yang belum teridentifikasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan di suatu daerah. Pajak daerah dan retribusi merupakan dua sumber penerimaan daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan khususnya dalam PAD.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2005:10). Definisi lain mengenai pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2009:12)

### 2.2 Desentralisasi Ekonomi /Fiskal

Menurut teori, desentralisasi didefinisikan sebagai pembentukan badan yang terpisah (*body separated*) dan diatur dengan hukum (undang-undang) dari pemerintah pusat, yang mana kekuasaan formal untuk menentukan kebijakan terhadap kepentingan publik diserahkan kepada pemerintah lokal (daerah) (Yustika, 2008:3).



Dengan kata lain desentralisasi dipergunakan untuk mengurangi kewenangan pusat dan diserahkan ke daerah, dimana tidak semua persoalan bisa diselesaikan oleh pusat secara langsung. Tujuannya adalah mendekatkan pelayanan masyarakat ke tingkat administrasi yang paling bawah.

Secara lebih khusus, menurut Litvack (1999) desentralisasi fiskal (ekonomi) merupakan pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah untuk mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan, hak menerima transfer dari pemerintahan pusat, dan menentukan daftar belanja rutin maupun investasi di daerah tersebut yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Murdiasmo (2009) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administratif melalui pemberian kewenangan di bidang keuangan.

Dalam tataran konseptual, desentralisasi fiskal bisa juga didefinisikan sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah guna mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Khusaini, 2006). Didalam prakteknya, konsep desentralisasi fiskal yang selama ini lebih dikenal dengan *money follow function* memberikan kondisi tertentu, yaitu pemberian kewenangan dan tugas kepada pemegang kekuasaan daerah (*expenditure assignment*) akan diikuti dengan pembagian kepada daerah dalam hal kewenangan penerimaan pendanaan (*revenue assignment*). Dengan kata lain, konsekuensi anggaran sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan yang sudah dilimpahkan dari pemerintah pusat. Kenyataan seperti ini berarti sangat membutuhkan kepastian hukum khususnya untuk pemerintah daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan termasuk pajak dan retribusi di dalamnya (Rahmawati, F. dalam Yustika, 2008).

### **2.3 Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara**

Keberhasilan pembangunan nasional memerlukan berbagai aspek penunjang, antara lain aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang berupa dana pembangunan baik yang diperoleh dari pajak atau non pajak. Dari sekian jenis penerimaan Negara yang diperuntukkan sebagai dana pembangunan, pajak adalah salah satunya. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan program pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemerintah harus bersungguh-sungguh di dalam pengelolaan pajak, seperti amanat yang konstitusi Negara kita Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 23 A yang menyatakan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat



memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang". Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi Pemerintah.

Sedangkan pajak sendiri secara pengertian bisa kita rujuk pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983, Bab 1. Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang No. 28 tahun 2007, yang berbunyi : "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Wijaya, E (2012), dalam sejarah perjalanan Negara kita ini telah diketahui bersama bahwa Pajak telah menjadi unsur yang utama untuk menstimulasi kegiatan perekonomian, menjalankan program pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum. Bahkan bisa diungkap secara persentase kurang lebih 70% pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun belakangan. Hal ini menandakan peranan pajak dalam mendukung serta mewujudkan stabilitas berkehidupan bangsa ini, bahkan harus lebih ditingkatkan merujuk pada tingginya kebutuhan penunjang kehidupan dan semakin kompleksnya tantangan jaman.

Berikut tabel yang menunjukkan besarnya peran pajak sebagai sumber pemasukan bagi biaya pembangunan nasional (asumsi pajak menyumbang  $\pm$  70% pendapatan Negara dalam APBN). Data yang ditampilkan adalah data perkembangan realisasi APBN dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014.

**Tabel 2.1 Data Perkembangan Realisasi APBN 2010 – 2014 (triliun rupiah)**

No	Tahun	Pendapatan Negara			Belanja Negara	Defisit
		Pajak ( $\pm$ 70%)	Lain-lain ( $\pm$ 30%)	Total		
1.	2010	696,71	298,59	995,3	1.042,1	(-46,8)
2.	2011	847,42	363,18	1.210,6	1.295,0	(-84,4)
3.	2012	936,67	401,43	1.338,1	1.491,4	(-153,3)
4.	2013	1005,9	431,1	1.437,0	1.639,8	(-202,8)
5.	2104	1166,97	500,13	1.667,1	1.842,5	(-175,4)

\*Ket: Tahun 2009-2013 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),  
Tahun 2014 APBN 2014, (Sumber: Kompas, Jum'at 15 Agustus 2014)

## 2.4 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Supramono (2009:125) <sup>2</sup> pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi

Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan<sup>2</sup> atas Barang Mewah. Subjek Pajak Pertambahan Nilai Menurut Resmi (2011:5) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Berikut dipaparkan Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyeteror, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Selain itu, Objek Pajak Pertambahan Nilai selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya ketentuan baru yang berlaku mulai 1 April 2010 PPN dikenakan atas :

- Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- Impor Barang Kena Pajak
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

<sup>2</sup> Sebelum memaparkan ketentuan tarif PPM, menurut Mardiasmo (2009:269) PPN mempunyai kelebihan yaitu :

- Menghilangkan pajak ganda.
- Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya.
- Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan nasional. Netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

## 2.5 Dasar Hukum Pengelolaan Pajak Hiburan oleh Daerah

Dalam melaksanakan seluruh kebijakan pemerintah harus memiliki landasan hukum yang mengikat. Demikian juga dalam pengelolaan pajak hiburan di Kota Batu, maka pemerintah daerah Kota Batu harus memiliki landasan hukum dalam pelaksanaannya. Dasar hukum untuk melakukan pengelolaan Pajak Hiburan di Kota Batu antara lain:

1. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
4. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.
5. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.

**Tabel 2.2 Norma Hukum Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Hiburan di Kota Batu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009**

Hal	Pasal	Ay	Bunyi Norma
Pajak Hiburan	42	1	Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran
		2	Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar, golf, dan boling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olahraga.
		3	Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah
	43	1	Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan
		2	Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan
	44	1	Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan
		2	Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan
	45	1	Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%

Prosiding seminar Nasional dan Pertemuan APSIPI  
 “Reformasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

Hal	Pasal	Ayat	3 Bunyi Norma
			(tiga puluh lima persen).
		2	Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
		3	Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
		4	Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
	46	1	Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
		2	Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan

### 3. METODE

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena peneliti ingin menelusuri permasalahan yang akan diselidiki dengan cara menggambarkan optimalisasi pengelolaan pajak hiburan oleh Pemda Kota Batu Pasca Implementasi PMK No.158/2015.

#### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pemaknaan teknik pengumpulan data adalah proses pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan pengklasifikasian tingkat ketepatan data untuk diproses pada sebuah analisa data sesuai metode yang digunakan baik berupa perolehan data primer ataupun sekunder. Untuk kategori data primer adalah sebuah data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu data hasil observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung di lapangan dan sumber data hasil wawancara dengan para ahli (sumber informasi). Tentunya sumber data tersebut harus diolah oleh peneliti tetap pada koridor kaidah ilmiah agar tetap obyektif dan dijabarkan secara sistematis. Teknik ini digunakan untuk menunjang data hasil pengamatan dan wawancara yang telah diperoleh oleh peneliti dengan cara menelusuri data yang berkaitan dengan pokok penelitian melalui form dokumen resmi, makalah, artikel, jurnal, data dari situs internet ataupun dokumen pribadi yang terkait Pengelolaan PPN dan Pajak Hiburan.

#### 3.3 Lokasi Penelitian: Kota Batu

Pertimbangan dipilihnya Pemerintah Kota Batu adalah (1) dikarenakan eksistensi sebagai daerah otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah masih relatif baru jika dibanding dengan Kota Malang dan Kabupaten Malang, dengan demikian akan terdapat banyak fenomena atau gejala sosial yang dapat dieksplorasi. (2) sebagai kota wisata objek hiburan di kota Batu dinilai memiliki nilai ekonomis yang laju kenaikannya relatif cepat. Sehingga fakta sosial terkait pengelolaan efektivitas pelayanan di Kota Batu menjadi menarik untuk diteliti.

#### 3.4 Analisa Data

Proses Analisa data adalah bagian paling utama tentang bagaimana suatu data dan informasi dianalisa dan dijabarkan sesuai tujuan penelitian. Sebagaimana dengan Metode penelitian kualitatif dengan tipe/jenis penelitian deskriptif model analisa data yang dipergunakan adalah analisa data kualitatif.



#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **1** 4.1 Optimalisasi pengelolaan Pajak Hiburan di Kota Batu Pasca ditetapkannya (PMK) No. 158/PMK.010/2015

Dalam skala mikro optimalisasi pajak dapat dilaksanakan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dari hasil survey. Sedangkan dalam skala makro dapat dilakukan dengan mengenakan pajak atas subyek atau obyek pajak yang semula belum dikenakan pajak. Hal ini dilaksanakan sesuai perkembangan potensi ekonomi di daerah tersebut. Dengan pengkajian yang komprehensif, sekiranya dapat ditentukan subyek ataupun obyek pajak baru yang akan menambah penerimaan pajak. Dinas Pendapatan Kota Batu dapat melakukan optimalisasi dengan cara :

- a. Mendatangi wajib pajak di Lokasi wajib pajak.
- b. Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
- c. Mengirimkan surat himbauan kepada wajib pajak.

Optimalisasi pajak dimaksudkan untuk meningkatkan pemasukan dari pajak melalui perluasan pungutan pajak (Soemitro,1990: 46), diantaranya:

- a. Menambah wajib pajak baru dengan menemukan wajib pajak baru.
- b. Menciptakan jenis/varian pajak-pajak baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa kegiatan optimalisasi merupakan kegiatan menambah wajib pajak dan menciptakan varian pajak baru dengan cara mendatangi wajib pajak atau mengirim surat himbauan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Dinas Pendapatan Kota Batu telah melakukan hal-hal tersebut. Sesuai dengan penyajian data di atas, Dinas Pendapatan Kota Batu telah melakukan beberapa upaya antara lain:

- a. Melakukan penggalan potensi di lapangan
- b. Melakukan sosialisasi dengan wajib pajak
- c. Pendataan ulang wajib pajak

Aktifitas-aktifitas tersebut merupakan usaha yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu dalam menambah jumlah wajib pajak dan menciptakan varian baru dalam pengenaan pajak. Jika di bandingkan dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut telah sesuai dengan peraturan, upaya Dinas Pendapatan Kota Batu poin a dan b telah sesuai dengan poin a dan c. Didukung dengan adanya usaha lain termasuk bekerja sama dengan instansi terkait juga telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan

Kota Batu untuk efektifitas dan efisiensi kinerja. Dalam melakukan kegiatan optimalisasi dibutuhkan *Standart Operational Prosedure* (SOP). Pemerintah Kota Batu telah menuangkan perencanaan optimalisasi melalui dua tahap yaitu :

- a. Penyusunan SOP, berkaitan dengan penentuan wajib pajak baru yang menjadi sasaran
- b. Penyusunan Rencana Kerja, berkaitan dengan penentuan prioritas sampai dengan teknis pelaksanaan.

Dinas Pendapatan Kota Batu sendiri bekerja dengan berbagai sub divisi, penyusunan SOP dilakukan oleh seksi pendataan. Secara teknis prosedur pelaksanaan optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu merujuk pada peraturan yang berlaku. Untuk seksi pendataan lebih ke penemuan wajib pajak hiburan baru, sedangkan untuk pengembangan potensi lebih ke penemuan potensi pajak baru.

Optimalisasi pengelolaan pajak adalah rangkaian kegiatan penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan wajib pajak yang telah dalam administrasi Dinas Pendapatan Daerah. Secara umum upaya optimalisasi dilakukan dengan cara penyuluhan memanfaatkan berbagai media baik cetak maupun elektronik, dalam situasi khusus bisa dilakukan dalam bentuk himbauan, pemeriksaan atau bahkan penyelidikan bila ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Melalui rencana optimalisasi yang telah dilaksanakan, Pemda Kota Batu dapat mencermati apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh obyek pajak yang ada padanya dengan sebenarnya. Lebih khusus untuk wajib pajak tertentu, bisa dalam bentuk konseling, Upaya optimalisasi dapat dilakukan dengan cara (Soemitro, 1990:42):

- 1) Penyempurnaan administrasi pajak;
- 2) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut;
- 3) Penyempurnaan Undang-Undang atau peraturan pajak

Berdasarkan pengertian dan tata cara optimalisasi, upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi pajak yang telah ada. Kegiatan optimalisasi ini berkaitan erat dengan kesadaran Wajib Pajak. Semakin sadarnya wajib pajak maka kegiatan optimalisasi semakin tidak diperlukan karena tanpa di himbau tanpa ada perubahan peraturan, wajib pajak secara suka rela membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebaliknya semakin rendahnya kesadaran wajib pajak maka kegiatan optimalisasi ini sangat dibutuhkan. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan telah disajikan pada bab penyajian data, ada



beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu sehubungan dengan kegiatan optimalisasi pajak hiburan di Kota Batu, antara lain :

- 1) Monitoring dan Evaluasi
- 2) Pelayanan Prima

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu. Monitoring dan Evaluasi ini bertujuan untuk mengontrol perkembangan wajib pajak setiap tiga bulan dan kemudian di evaluasi terkait perbedaan perlakuan dengan sebelumnya. Dinas Pendapatan Kota Batu berusaha melakukan pelayanan seoptimal mungkin terhadap wajib pajak. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya pelayanan ini bertujuan untuk menarik wajib pajak agar semakin sadar terhadap pajak. Pelayanan ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibanya sebagai wajib pajak.

Jika dibandingkan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Sumitro dalam bukunya, Optimalisasi pajak hiburan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu belum sepenuhnya sesuai, hal ini bisa dilihat kedua aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu hanya mencakup poin penyempurnaan administrasi. Untuk peningkatan mutu pegawai dan penyempurnaan pertauran belum tercermin dari aktivitas optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu. Peningkatan mutu pegawai dan pemungut belum dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu. Berkaitan dengan pelatihan dari dalam untuk meningkatkan *skill* karyawan, pihak Dinas Pendapatan Kota Batu mengaku belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan minimalnya fasilitas yang diberikan pemerintah.

**Tabel 3. Penerimaan (Target dan Realisasi) Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2009-2014**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2009	2.800.000,-	1.978.360.490,-	70,66
2010	4.000.000,-	2.766.190.750,-	69,15
2011	3.155.000,-	3.751.062.526,-	119,89
2012	2.830.000,-	3.402.281.809,-	120,22
2013	5.380.000,-	6.296.771.461,-	117,04
2014	6.000.000,-	6.019.223.859,-	100,32

**Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu, 2015**

Untuk penyempurnaan kinerja atau *skill* pegawai dinas pendapatan daerah, dibutuhkan peraturan daerah yang mendasari proses kegiatan optimalisasi pajak hiburan. Peraturan daerah kota batu sendiri mengalami sekali perubahan Berdasarkan penjelasan tersebut, penyempurnaan undang-undang belum maksimal

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu, dikarenakan tidak ada peraturan daerah secara spesifik mengatur tentang upaya optimalisasi yang seharusnya menjadi dasar aktivitas yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu. Pemerintah daerah masih mengacu pada peraturan pusat terkait.

#### **4.2 Pengelolaan Hambatan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hiburan Di Kota Batu Pasca Ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 158/PMK.010/2015**

Upaya optimalisasi yang dilaksanakan oleh Dispenda Kota Batu dalam prakteknya, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dialami. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya kendala tersebut antara lain :

- a. Anggaran Dinas Pendapatan Kota Batu yang terbatas
- b. Kurangnya pemahaman wajib pajak yang suka menghindar untuk dikenakan pajak
- c. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai pada bidang Seksi Pengawasan

Anggaran Dinas Pendapatan yang terbatas menjadi kendala karena dalam proses pelaksanaan optimalisasi terutama survei lapangan dan sosialisasi, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk lancarnya kegiatan tersebut, terutama dana operasional. Dalam praktek sering terjadi terbatasnya anggaran mengakibatkan pihak Dinas Pendapatan Kota Batu mengalami keterbatasan jangkauan, sehingga proses survei hanya bersifat *sampling*, artinya hal ini bisa berakibat hasil survei yang kurang optimal.

Dasar penghitungan pajak hiburan adalah jumlah yang diterima oleh penyelenggara hiburan (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 5). Fakta di lapangan masih cukup banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pendapatan secara lengkap. Banyak terjadi di beberapa tempat hiburan, misalnya ada objek wisata tidak menunjukkan hasil penjualan karcis yang sebenarnya kepada petugas pengawas lapangan, akhirnya Dinas Pendapatan Kota Batu harus melakukan pemeriksaan terkait permasalahan tersebut.

Sedangkan kendala terkait dengan Sumber Daya Manusia berkaitan dengan kuantitas dan kualitas dari SDM itu sendiri. Di internal kepengurusan Dinas Pendapatan Kota Batu masih ditemui kondisi divisi yang terbatas secara jumlah di divisinya sebagai contoh adalah di seksi pengawasan dan pengendalian. Berkaitan dengan SDM yang ada di Dinas Pendapatan Kota Batu, berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2010 Pasal 36, pemerintah daerah telah memberikan insentif kepada pegawai ketika telah mencapai target kerja tertentu. Tujuan dari adanya insentif tersebut sebagai motivasi peningkatan kinerja dari pegawai, artinya walaupun sumber daya

masih terbatas tetapi dengan adanya insentif tersebut bisa memaksimalkan hasil kinerja yaitu pencapaian target dari pajak hiburan.

Kualitas SDM, pihak dispenda juga mengakui bahwa *skill* pegawai juga masih terbatas, hal ini menjadi kendala karena dalam fakta yang terjadi di lapangan berbeda dengan teori. Terkadang Dinas Pendapatan Kota Batu kurang bisa mengakomodir segala sesuatu yang terjadi di lapangan kemungkinan masih sering terjadi, sebagai contoh proses pengawasan, masih banyak pegawai yang kurang memahami prosedur pengawasan yang baik dan benar. Kondisi semacam ini terjadi karena minimalnya pelatihan dan pembekalan untuk pegawai ketika hendak terjun ke lapangan. Kesalahan pegawai atau *human error* semakin tinggi.

Dinas Pendapatan Kota Batu menjelaskan bahwa akar dari hambatan atau kendala dalam upaya optimalisasi dan optimalisasi pajak hiburan di Kota Batu adalah terbatasnya anggaran. Minimalnya pengetahuan wajib pajak soal pajak bisa diatasi dengan dilakukan sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, sosialisasi harus semakin intensif dan hal ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. *Skill* pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu akan semakin terlatih dengan banyaknya pelatihan dan pembekalan, tentu untuk mengadakan kegiatan semacam itu juga dibutuhkan anggaran yang cukup.

#### 4. KESIMPULAN

Pemerintah daerah Kota Batu melalui Dinas Pendapatan telah melaksanakan upaya optimalisasi pajak hiburan, antara lain:

1. Melaksanakan pendataan kembali potensi wajib pajak;
2. Melakukan penyebaran informasi kemudahan mengurus pajak hiburan kepada wajib pajak;
3. Mengulangi pendataan secara administratif wajib pajak di Kota Batu;
4. Koordinasi intensif dengan pihak yang terkait fasilitas hiburan di Kota Batu.
5. Mengintensifkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi
6. Melaksanakan Pelayanan Prima sebagai perwujudan pelayanan terhadap masyarakat

Usaha optimalisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dialami dalam prakteknya antara lain :

1. Terbatasnya Anggaran Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Batu
2. Kurangnya pemahaman wajib pajak yang suka menghindar untuk dikenakan pajak
3. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai pada bidang Seksi Pengawasan

#### 5. SARAN

Pajak hiburan memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk itu penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM pada seksi pengawasan dengan cara mengalokasikan pegawai yang ada agar lebih maksimal dalam proses pengawasan langsung dilapangan.
2. Meningkatkan teknologi administrasi sehingga lebih mempermudah dalam proses penerimaan laporan dari wajib pajak hiburan dan mengurangi terjadinya human error dalam proses pelaporan.
3. Pemerintah daerah membuat peraturan secara khusus terkait upaya optimalisasi, agar dinas pendapatan Kota Batu dapat dengan jelas dan tepat dalam pelaksanaan proses optimalisasi. Sebagai contohnya adalah pembuatan Standar operasional prosedur tentang Pelaksanaan Optimalisasi.
4. Mengalokasikan anggaran Dinas pendapatan kepada kegiatan yang lebih diutamakan guna memaksimalkan kinerja. Terutama pada bidang pengawasan yang memiliki jumlah staf terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Faisal, Sanapiah. 1999, *Format-format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hidayat, Syarif. 2005. *Too Much Too Soon ; Local States Elite's Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Rajawali Pers. Jakarta
- Kaho, Josef Riwu. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM. Yogyakarta.
- Kasim, M. 1989. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta
- Khusaini, M. 2006. *Ekonomi Publik - Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE Unibraw. Malang
- Litvack, Jennie. 1999. *Decentralization*. World Bank. Washington DC.
- Mawhood P. (ed), 1987. *Local Government in The Third World: The Experience of Tropical Africa*. Chicester: Jhon Wiley & Sons.
- Mardiasmo. "Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi:2005-2008" dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie, 2009. *Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Penerbit Kompas. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Moleong, Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Cet. Duapuluh Edisi Revisi. Bandung.
- Murdiasmo. 2009. *Akutansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Cet. Kesepuluh. Yogyakarta.
- Pasolong, H. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafino Persada
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Refika Aditama. Bandung
- T.H Simanjuntak & I. Mukhlis 2012, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Yani, A. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia: Kajian Teoritis dan Realitas Empiris*. Bayumedia Publishing. Malang

### Jurnal dan Internet:

- Hutagaol, PM John. 2012. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Hasil Penelitian yang dipublikasikan pada E-Jurnal Pajak Dirjen Pajak. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tersedia pada laman: <http://www.pajak.go.id/content/jurnal-pajak>. Diakses Tgl. 3 September 2014. Pukul: 11.38 WIB
- Sumenge, Ariel Sharon. 2013. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA Vol. 1 No.3 September 2013. Hal 74-81. ISSN: 2303-1174
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.10 No. 1 Juni 2009. Hal 103-124. (Diakses dari: <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/96/07-Hadi%20Sasana.pdf?sequence=1>, tanggal 2 September 2014 pukul 22.00 wib)

Wijayan, E. 2012. Menyelami Arti Penting Pajak dan Kemandirian Bangsa. Artikel Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tersedia pada laman: <http://www.pajak.go.id/content/article/menyelami-arti-penting-pajak-dan-kemandirian-bangsa>. Diakses Tgl. 3 September 2014. Pukul: 11.33 WIB

**Undang-Undang dan Peraturan :**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan  
Perda Kota Batu No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan  
Perda Kota Batu No 2 Tahun 2012 Perubahan tentang Perda No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan  
Perwali No 12 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 16 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

**Media :**

Kompas. 15 Agustus 2014. *"Tanpa Reformasi, Negara Kian Tekor"*. Hal: 1 – bersambung ke hal 15 (kolom 1-5). Versi Cetak. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.  
Kompas. 16 Agustus 2014. *"APBN Raksasa, Stimulus Minim: Jokowi Akan Potong Subsidi"*. Hal: 1 – bersambung ke hal 15 (kolom 5-7). Versi Cetak. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.

# Prosiding seminar Nasional dan Pertemuan APSIPI

## ORIGINALITY REPORT

11%	10%	0%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	research-report.umm.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to Trisakti University Student Paper	3%
3	bambangkharisma94.blogspot.com Internet Source	3%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 3%
Exclude bibliography	On		